

# PERKEMBANGAN INDEKS INKLUSIF KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Agung Setiawan Samuel Putra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya, Indonesia,

‡Korespondensi author: [agung.putra@bps.go.id](mailto:agung.putra@bps.go.id)

## ARTIKEL INFO

## Abstract

### *Article history:*

*Received 13 Augst, 2025*

*Revised 13 Oct, 2025*

*Accepted 9 Dec, 2025*

*Published 31 Dec, 2025*

**Intoduction:**This study explores how inclusive economic growth has unfolded across 22 regencies and municipality in Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. **Background Problem:** Inclusive growth has not been evenly distributed, as reflected in varying levels of poverty, income inequality, and employment absorption across regions. **Novelty:**The study develops the Inclusive Index II, which combines three key indicators: the poverty rate, income inequality (Gini Ratio), and the Employment-to-Population Ratio (EPR). The index ranges from 0 to 1, with values closer to 0 indicating a more inclusive economy, one in which economic growth effectively reduces poverty, lowers income inequality, and increases labor absorption. **Research Method:** By applying the Klassen Typology, this study mapped each area into one of four categories: (I) economically strong and inclusive, (II) inclusive but economically lagging, (III) lagging and non-inclusive, and (IV) economically strong but exclusive. **Result:** Most regencies fell into Quadrants II and III, showing that inclusive growth is far from evenly distributed. These insights highlight the urgent need for locally tailored, evidence-based policies that not only stimulate economic growth but also ensure that such growth is genuinely inclusive and uplifting for the people.

### **Keywords:**

Inclusive Growth; Poverty; Inequality; Employment; Klassen Typology

## 1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mengubah kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pembangunan ekonomi seharusnya dipandang sebagai proses multidimensi yang melingkupi perubahan dalam kehidupan sosial, masyarakat dan juga institusi. Pembangunan bukan hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melingkupi perbaikan dalam distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan perluasan pilihan serta kebebasan masyarakat (Todaro dan Smith, 2015). Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi bukan sekedar peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga perbaikan pada kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia (BPS, 2024), meskipun Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB)-nya menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya. Hampir seluruh kabupaten/kota di wilayah ini mencatatkan peningkatan PDRB yang konsisten. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB per kapita Provinsi NTT pada tahun 2024 berada pada angka Rp 24.272.000 (BPS, 2024a). Kendati demikian, nilai ini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Tingginya proporsi penduduk miskin dan rentan miskin menegaskan bahwa persoalan kemiskinan dan ketimpangan merupakan tantangan besar dalam pembangunan di Provinsi NTT.

Dalam konteks di atas, strategi pembangunan berbasis pertumbuhan inklusif menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan penciptaan pada pertumbuhan pendapatannya, tetapi manfaatnya dapat dirasakan, dan juga seluruh masyarakat memiliki akses yang sama atau adil terhadap peluang pertumbuhan ekonominya. Peningkatan pendapatan memang merupakan pilar utama dalam mendorong pertumbuhan inklusif itu sendiri. Pendapatan yang meningkat diharapkan dapat mendorong pengurangan pada kemiskinan, ketimpangan, dan sekaligus mampu membuka lebih banyak ruang partisipasi ekonomi bagi masyarakatnya.

Ali (2007) berpendapat bahwa pertumbuhan inklusif harus menjamin kesetaraan akses bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun wilayah geografis mereka. Sementara McKinley (2010) menambahkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan produktif menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan proses pertumbuhan yang inklusif.

Ramos et al. (2013) dalam penelitiannya menyampaikan beberapa studi mengukur pertumbuhan inklusif cenderung berorientasi pada kelompok miskin semata, seharusnya tetap mempertimbangkan dimensi ketimpangan dan kemiskinan sebagai elemen inti. Selanjutnya, Ramos et al. (2013) memfokuskan pada seberapa besar inklusivitas dari pertumbuhan yang dihasilkan, dengan membagi analisis menjadi dua dimensi utama. Dimensi pertama adalah *Benefit Sharing Dimension*, untuk melihat apakah proses pertumbuhan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini selaras dengan konsep *pro poor growth*, yaitu pertumbuhan dianggap pro miskin jika pendapatan masyarakat miskin lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat kaya sehingga ketimpangan berkurang. Sementara dimensi berikutnya adalah *Participation Dimension*, digunakan untuk melihat keterlibatan dan peran masyarakat dalam proses pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat ini mengukur tingkat keterlibatan penduduk usia kerja, yang direpresentasikan melalui rasio EPR (*Employment-to-Population Ratio*).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka fokus penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar inklusivitas yang dihasilkan dari pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi NTT. Selain itu, juga akan membentuk Indeks Inklusif II sesuai dengan referensi jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ramos et al. (2013) dan diterapkan secara menyeluruh untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT.

## 2. Metodologi

Dalam menghasilkan Indeks Inklusif yang dapat diperbandingkan antar kabupaten/kota di Provinsi NTT, penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis sederhana dari rata-rata dimensi kemiskinan, ketimpangan dan ketenagakerjaan sesuai dengan pendekatan Ramos et al. (2013) yang selanjutnya dikenal dengan Indeks Inklusif II. Sebelum dilakukan penyusunan indeks, peneliti terlebih dahulu menyajikan gambaran umum dari masing-masing dimensi penyusun Indeks Inklusif II menurut kabupaten/kota di NTT. Dalam memahami dinamika perkembangan inklusivitas dari waktu ke waktu, peneliti menetapkan tiga titik waktu amatan, yaitu tahun 2018, 2020 dan 2024. Pemilihan tahun-tahun ini dimaksudkan untuk memberikan representasi kondisi sebelum pandemi Covid-19, saat pandemi berlangsung, dan kondisi pasca pandemi tersebut.

### 2.1. Bahan dan Sumber Data

Kajian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi resmi BPS. Data yang digunakan mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT. Selanjutnya, data-data ini diolah sesuai dengan pemanfaatannya untuk kajian ini.

#### 1) PDRB per Kapita

PDRB per Kapita dihitung sebagai hasil bagi antara nilai total PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduknya dalam periode tertentu (BPS, 2023). Indikator ini menggambarkan kontribusi dari rata-rata tiap individu terhadap perekonomian. Dalam konteks kajian ini, digunakan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 yang diambil dari publikasi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi NTT menurut Lapangan Usaha.

#### 2) Persentase Penduduk Miskin

Definisi penduduk miskin merujuk pada individu atau kelompok yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, mencakup kebutuhan pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal serta kesempatan kerja (BPS, 2024b). Sementara persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk, dikalikan 100 persen. Data dalam kajian ini mengacu pada publikasi Ringkasan Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi NTT yang diterbitkan oleh BPS Provinsi NTT tahun 2018, 2020, dan 2024 disajikan menurut kabupaten/kota.

#### 3) Rasio Gini

Untuk mengukur ketimpangan, kajian ini menggunakan data Rasio Gini yang merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Rasio Gini memungkinkan perbandingan ketimpangan lintas wilayah kabupaten/kota di Provinsi NTT. *World Bank* (2023) menjelaskan penggunaan Rasio Gini penting dalam mengkaji sejauh mana hasil

pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan yang tinggi beresiko menimbulkan ketidakstabilan sosial dan menurunkan efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan. Data Rasio Gini yang dianalisis berasal dari BPS Provinsi NTT tahun 2018, 2020, dan 2024 menurut kabupaten/kota.

#### 4) *Employment-to-Population Ratio (EPR)*

Rasio keterlibatan kerja atau EPR dipilih sebagai salah satu variabel utama dalam penelitian karena merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang paling representatif dalam menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. EPR dihitung sebagai persentase penduduk usia kerja yang benar-benar bekerja terhadap total penduduk usia kerja. Menurut International Labour Organization (2022) indikator ini mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi penduduk usia produktif. EPR yang tinggi menunjukkan pasar tenaga kerja yang aktif dan relatif inklusif, sementara EPR yang rendah menjadi tanda adanya pengangguran atau hambatan struktural dalam akses terhadap pekerjaan. Selain itu, indikator ini juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, kesetaraan gender dalam pasar kerja, serta hubungan antara pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja (*World Bank, 2021*).

## 2.2. Metode Penelitian

Kajian ini akan menerapkan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif untuk menyajikan gambaran umum terkait kondisi Indeks Inklusif II dan PDRB per kapita di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT. Analisis dilakukan secara visual melalui penyajian grafik dan tabel guna memperlihatkan perbandingan antarwilayah. Selain itu, kajian ini akan menggunakan pendekatan Tipologi Klassen untuk mengelompokkan daerah berdasarkan kombinasi antara tingkat kesejahteraan ekonomi yang diukur melalui PDRB per kapita dan nilai Indeks Inklusif II. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memudahkan dalam mengidentifikasi pola-pola pembangunan ekonomi di wilayah masing-masing. Melalui pendekatan ini, kabupaten/kota akan dikelompokkan kedalam empat kategori yang menggambarkan karakteristik pertumbuhan dan inklusivitas secara simultan.

### Perhitungan Indeks Inklusif II

Penelitian ini akan menghitung Indeks Inklusif sesuai dengan jurnal referensi perhitungan Indeks dilakukan Ramos, Ranieri dan Lammens (2013) yang selanjutnya akan disebut Indeks Inklusif II. Indeks ini dibentuk dengan cara menghitung rata-rata sederhana dari tiga indikator utama, yaitu tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin), ketimpangan pendapatan (Rasio Gini), dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja (EPR). Sebelum dilakukan perhitungan indeks gabungan, terlebih dahulu seluruh

komponen indikator dinormalisasi menggunakan metode *Min-Max Normalization*. Tujuannya adalah menyetarakan skala dari ketiga indikator, agar masing-masing memiliki bobot pengaruh yang setara dalam perhitungan Indeks Inklusif II.

Untuk indikator kemiskinan dan ketimpangan digunakan rumus normalisasi sebagai berikut :

$$x'' = \frac{x - \min}{- \min} \quad (1)$$

Sementara untuk indikator EPR, rumus normalisasi disesuaikan dikarenakan hubungan antara tingkat inklusivitas bersifat terbalik. Semakin tinggi EPR, maka semakin baik kondisi inklusivitasnya. Oleh karena itu, rumus normalisasi untuk komponen ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

$$x'' = 1 - \frac{x - \min}{- \min} \quad (2)$$

Setelah semua komponen nilai dinormalisasi, Indeks Inklusif II dihitung dengan merata-rata kan ketiga nilai normalisasi untuk masing-masing komponen yaitu :

$$II = \frac{x''_{kemiskinan} + x''_{ketimpangan} + x''_{ketenagakerjaan}}{3} \quad (3)$$

Keterangan :

- $x''$  : nilai normalisasi min-max
- $x$  : nilai observasi
- max : nilai terbesar observasi
- min : nilai terkecil observasi
- II : Indeks Inklusif II

Indeks Inklusif II memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1. Nilai indeks yang mendekati angka 0 mengindikasikan daerah tersebut sangat inklusif. Sebaliknya, jika nilai Indeks mendekati angka 1 mengindikasikan daerah tersebut tidak inklusif.

Kriteria penilaian berdasarkan nilai Indeks Inklusif II diklasifikasikan sebagai berikut:

- $0 < II \leq 0,2$  : sangat inklusif
- $0,2 < II \leq 0,4$  : inklusif tinggi
- $0,4 < II \leq 0,6$  : inklusif menengah
- $0,6 < II \leq 0,8$  : inklusif rendah
- $0,8 < II \leq 1$  : tidak inklusif

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Gambaran Komponen Kemiskinan

Komponen Kemiskinan merupakan salah satu dimensi utama dalam mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang ada bersifat inklusif. Mengacu pada pendekatan Ramos et al. (2013), penurunan angka kemiskinan dalam satu wilayah mencerminkan semakin baiknya distribusi manfaat dari pertumbuhan yang terjadi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, secara umum menunjukkan mayoritas wilayah di NTT mengalami penurunan tingkat kemiskinan selama periode 2018 hingga 2024. Dari 22 kabupaten/kota yang dianalisis, hampir semuanya mencatat penurunan meskipun besarnya bervariasi.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2018, 2020 dan 2024

Kabupaten/Kota	Persentase penduduk miskin (%)			Perubahan (%)
	2018	2020	2024	
Sumba Barat	28,51	28,17	26,52	-1,99
Sumba Timur	30,13	29,65	27,04	-3,09
Kupang	23,10	22,77	21,37	-1,73
Timor Tengah Selatan	28,06	27,49	24,68	-3,38
Timor Tengah Utara	22,31	22,28	20,89	-1,42
Belu	15,70	15,37	13,86	-1,84
Alor	21,63	21,09	19,87	-1,76
Lembata	26,45	26,14	24,22	-2,23
Flores Timur	11,05	10,84	11,25	0,20
Sikka	13,82	13,12	11,89	-1,93
Ende	24,20	23,76	22,57	-1,63
Ngada	12,94	12,51	11,87	-1,07
Manggarai	20,83	20,34	19,01	-1,82
Rote Ndao	28,08	27,54	25,78	-2,30
Manggarai Barat	18,14	17,71	16,74	-1,40
Sumba Tengah	34,85	34,49	30,84	-4,01
Sumba Barat Daya	28,88	28,00	27,20	-1,68
Nagekeo	12,98	12,61	12,30	-0,68
Manggarai Timur	26,50	26,52	24,90	-1,60
Sabu Raijua	30,83	30,18	28,13	-2,70
Malaka	16,34	16,04	13,92	-2,42
Kota Kupang	9,61	8,96	8,24	-1,37

Sumber : BPS Provinsi NTT, (diolah)

Beberapa wilayah menunjukkan penurunan kemiskinan yang relatif tinggi pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2018, seperti Sumba Tengah mengalami penurunan sebesar 4,01 persen, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 3,38 persen, dan Sumba Timur sebesar 3,09 persen. Namun, masih terdapat pula daerah yang justru mengalami kenaikan persentase penduduk miskin pada tahun 2024, yaitu Kabupaten Flores Timur. Meskipun secara umum terjadi penurunan pada persentase kemiskinan,

namun masih banyak wilayah yang menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di tahun 2024, seperti Kabupaten Sumba Tengah (30,84 persen), Sabu Raijua (28,13 persen), Sumba Barat Daya (27,20 persen), dan Sumba Timur (27,04 persen). Secara umum, hampir semua daerah masih menghadapi tantangan serius dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.

### Gambaran Komponen Ketimpangan

Ketimpangan pendapatan merupakan dimensi krusial dalam mengevaluasi inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Dalam pendekatan Ramos et al. (2013), penurunan ketimpangan yang diukur melalui rasio gini menandakan distribusi manfaat yang semakin merata dalam perekonomian. Oleh karena itu, komponen ketimpangan menjadi bagian penting dalam mengukur pembagian manfaat dari proses pertumbuhan yang dialami wilayah.

Tabel 2. Rasio Gini menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018, 2020 dan 2024

Kabupaten/Kota	Rasio Gini			Perubahan (%)
	2018	2020	2024	
Sumba Barat	0,355	0,321	0,277	-0,078
Sumba Timur	0,310	0,299	0,285	-0,025
Kupang	0,357	0,356	0,330	-0,027
Timor Tengah Selatan	0,292	0,304	0,284	-0,008
Timor Tengah Utara	0,321	0,301	0,343	0,022
Belu	0,397	0,315	0,308	-0,089
Alor	0,330	0,334	0,303	-0,027
Lembata	0,381	0,387	0,284	-0,097
Flores Timur	0,344	0,317	0,286	-0,058
Sikka	0,336	0,384	0,299	-0,037
Ende	0,311	0,341	0,286	-0,025
Ngada	0,315	0,326	0,343	0,028
Manggarai	0,282	0,295	0,274	-0,008
Rote Ndao	0,336	0,400	0,301	-0,035
Manggarai Barat	0,295	0,367	0,324	0,029
Sumba Tengah	0,293	0,327	0,334	0,041
Sumba Barat Daya	0,333	0,311	0,313	-0,020
Nagekeo	0,307	0,318	0,302	-0,005
Manggarai Timur	0,236	0,254	0,291	0,055
Sabu Raijua	0,303	0,320	0,323	0,020
Malaka	0,275	0,278	0,330	0,055
Kota Kupang	0,354	0,321	0,284	-0,070

Sumber : BPS Provinsi NTT, (diolah)

Tabel 2 menunjukkan tren penurunan ketimpangan walaupun relatif kecil. Beberapa daerah mencatatkan penurunan Rasio Gini pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2018, seperti Kabupaten Lembata turun sebesar 0,097 poin, Belu turun sebesar 0,089 poin, dan Sumba Barat 0,078 poin. Namun disisi lain, beberapa daerah

mencatikan kenaikan Rasio Gini, seperti Kabupaten Manggarai Timur yang naik sebesar 0,055 poin, Malaka naik 0,055 poin dan Sumba Tengah naik 0,041 poin, yang menandakan distribusi pendapatan menjadi sedikit tidak merata. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi NTT masih menghadapi tantangan terkait ketimpangan pendapatan antarwilayah, terutama di kabupaten-kabupaten yang mengalami kenaikan Rasio Gini dalam beberapa tahun terakhir.

### Gambaran Komponen Ketenagakerjaan

Dalam kerangka pertumbuhan inklusif, partisipasi tenaga kerja menjadi salah satu aspek penting dalam memahami sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ramos et al. (2013) menyatakan bahwa keterlibatan penduduk usia produktif dalam pasar kerja mencerminkan kemampuan ekonomi dalam menyediakan akses terhadap pekerjaan. EPR yang digunakan dalam kajian ini menunjukkan seberapa besar bagian dari penduduk usia kerja yang aktif bekerja. Oleh karena itu, EPR menjadi indikator utama dalam mengukur dimensi partisipasi dalam inklusivitas pertumbuhan.

Tabel 3. *Employment to Population Ratio* atau EPR Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2018, 2020 dan 2024

Kabupaten/Kota	Rasio Angkatan Kerja (EPR)			Perubahan EPR (%)
	2018	2020	2024	
Sumba Barat	63,97	71,06	77,19	13,21
Sumba Timur	77,08	72,13	74,48	-2,60
Kupang	69,94	72,15	69,28	-0,66
Timor Tengah Selatan	75,96	74,47	87,41	11,44
Timor Tengah Utara	75,04	78,13	82,66	7,62
Belu	65,62	70,23	79,86	14,24
Alor	65,83	75,27	81,15	15,32
Lembata	68,06	68,95	83,53	15,47
Flores Timur	68,98	71,79	74,26	5,27
Sikka	70,63	73,42	73,99	3,36
Ende	73,63	72,22	77,30	3,66
Ngada	70,89	71,49	86,40	15,50
Manggarai	73,14	76,53	83,14	10,00
Rote Ndao	72,98	73,07	71,82	-1,16
Manggarai Barat	67,24	78,52	76,75	9,51
Sumba Tengah	63,40	69,98	76,66	13,26
Sumba Barat Daya	79,68	77,91	78,70	-0,98
Nagekeo	63,80	70,05	76,01	12,21
Manggarai Timur	67,88	81,73	83,36	15,48
Sabu Raijua	75,72	75,11	77,44	1,72
Malaka	71,76	67,47	72,08	0,33
Kota Kupang	57,67	64,14	67,01	9,34

Sumber : BPS Provinsi NTT, (diolah)

Tabel 3 menunjukkan sebagian besar kabupaten/kota di NTT mengalami peningkatan pada angka partisipasi tenaga kerja selama periode 2018 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berlangsung, mampu untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sejumlah daerah menunjukkan rasio angkatan kerja yang tinggi seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ngada, Manggarai, Lembata dan Alor. Namun, peningkatan EPR yang tinggi tidak serta merta menurunkan persentase penduduk miskin yang signifikan di wilayah tersebut. Walaupun EPR tinggi, persentase kemiskinan di wilayah tersebut masih juga tinggi. Menurut Todaro dan Smith (2015), banyak wilayah miskin memiliki EPR yang tinggi karena keterpaksaan masyarakat untuk bekerja pada sektor informal berproduktivitas rendah demi memenuhi kebutuhan hidup, bukan karena tersedianya lapangan kerja yang layak.

Disisi lain, terdapat beberapa wilayah yang mengalami penurunan pada angka EPR dalam periode tersebut. Contohnya, Kabupaten Sumba Timur (-2,60 persen), Rote Ndao (-1,16 persen), Sumba Barat Daya (-0,98 persen), dan Kabupaten Kupang (-0,66 persen). Penurunan EPR yang terjadi dapat menunjukkan berbagai dinamika, seperti keterbatasan lapangan kerja, peningkatan pengangguran, atau tingginya ketergantungan ekonomi rumah tangga pada sektor-sektor informal yang berisiko rendah. Hal ini menjadi sinyal penting bahwa terdapat tantangan besar dalam menyerap tenaga kerja lokal, baik karena terbatasnya peluang kerja maupun rendahnya daya saing tenaga kerja itu sendiri. Berdasarkan uraian terkait EPR, menunjukkan bahwa aspek partisipasi ekonomi di Provinsi NTT sudah mulai mengarah pada pola pertumbuhan yang inklusif. Namun, beberapa wilayah yang mengalami penurunan pada nilai EPR menunjukkan adanya tantangan dalam mendorong penciptaan dan akses terhadap pekerjaan produktif dan layak.

### **Indeks Pertumbuhan Inklusif II**

Pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari besarnya peningkatan PDRB, tetapi sejauh mana hasil dari pertumbuhan itu dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Untuk mengukur tingkat pemerataan dan partisipasi dalam pertumbuhan yang terjadi, digunakan Indeks Inklusif II. Indeks ini menunjukkan tingkat inklusivitas pertumbuhan dengan rentang nilai 0 hingga 1, di mana nilai indeks yang mendekati 0 mencerminkan pertumbuhan yang inklusif, sementara nilai yang mendekati 1 menunjukkan pertumbuhan yang tidak inklusif.

Tabel 4 menunjukkan pola pertumbuhan inklusif yang beragam. Beberapa wilayah mengalami penurunan skor indeks secara konsisten, menandakan kemajuan yang baik dalam pertumbuhan yang merata dan melibatkan partisipasi penduduknya. Namun, tidak sedikit juga wilayah yang justru mengalami kenaikan skor indeks inklusif, yang artinya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut semakin jauh dari prinsip inklusivitas.

Beberapa wilayah yang mengalami perbaikan cukup berarti dalam hal penurunan skor indeks inklusif, seperti Kabupaten Lembata (0,35 poin), Sumba Barat (0,28 poin), Belu (0,26 poin), dan beberapa wilayah lain yang mengalami penurunan pada nilai Indeks Inklusif II. Penurunan skor ini bisa diartikan sebagai kemajuan positif yang kemungkinan berasal dari penurunan angka kemiskinan secara bertahap, meningkatnya partisipasi penduduk dalam lapangan kerja ataupun distribusi pendapatan yang semakin merata. Wilayah-wilayah ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak saja terjadi tetapi mampu terdistribusi dengan adil.

Namun demikian, tidak semua wilayah kabupaten/kota mengalami perbaikan pada skor indeksnya. Beberapa wilayah justru mengalami kenaikan pada nilai indeksnya seperti Kabupaten Malaka (0,32 poin), Sabu Raijua (0,21 poin), Kupang dan Timor Tengah Utara (0,18 poin). Kenaikan skor Indeks Inklusif II ini mencerminkan menurunnya tingkat inklusivitas, kemiskinan bisa saja tetap tinggi, ketimpangan bisa memburuk, atau masyarakat yang semakin sulit mengakses peluang kerja yang ada. Artinya, meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan yang terjadi tidak dinikmati secara merata.

Tabel 4. Indeks Inklusif II Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2018, 2020, dan 2024

Kabupaten/Kota	Indeks Inklusif II			Perubahan Indeks Inklusif II
	2018	2020	2024	
Sumba Barat	0,73	0,61	0,45	-0,28
Sumba Timur	0,46	0,55	0,54	0,08
Kupang	0,58	0,59	0,76	0,18
Timor Tengah Selatan	0,42	0,49	0,29	-0,13
Timor Tengah Utara	0,41	0,35	0,60	0,18
Belu	0,63	0,44	0,37	-0,26
Alor	0,56	0,46	0,41	-0,15
Lembata	0,70	0,77	0,35	-0,35
Flores Timur	0,40	0,36	0,32	-0,09
Sikka	0,40	0,51	0,39	-0,01
Ende	0,44	0,57	0,43	0,00
Ngada	0,34	0,40	0,40	0,06
Manggarai	0,34	0,34	0,23	-0,11
Rote Ndao	0,55	0,74	0,64	0,09
Manggarai Barat	0,42	0,43	0,54	0,12
Sumba Tengah	0,70	0,72	0,80	0,10
Sumba Barat Daya	0,46	0,45	0,61	0,16
Nagekeo	0,43	0,42	0,38	-0,05
Manggarai Timur	0,40	0,23	0,39	-0,01
Sabu Raijua	0,48	0,55	0,69	0,21
Malaka	0,29	0,42	0,60	0,32
Kota Kupang	0,58	0,49	0,38	-0,20

Sumber : BPS Provinsi NTT, (diolah)

Selanjutnya, hal menarik lain yang dapat dianalisis adalah pada tahun 2020 menunjukkan Indeks Inklusif II yang tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi Covid-19. Nilai indeks masih cenderung bervariasi dengan tingkat kenaikan atau penurunan indeks yang tidak terlalu ekstrim. Data menunjukkan bahwa dampak langsung dari pandemi terhadap kondisi perekonomian Provinsi NTT tampaknya tidak sebesar yang terjadi di wilayah lain di Indonesia. Secara umum, indikator utama seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan partisipasi angkatan kerja yang cenderung stabil bahkan menunjukkan perbaikan nominal di sejumlah wilayah kabupaten/kota.

Stabilitas ini dapat dijelaskan oleh karakteristik struktur perekonomian NTT sendiri, dimana perekonomian daerah ini relatif terisolasi dari pasar nasional atau global, dengan aktivitas ekonomi yang dominan di sektor pertanian, peternakan dan kegiatan ekonomi informal skala kecil lainnya. Ketergantungan yang rendah terhadap sektor formal dan ekspor membuat guncangan eksternal akibat pandemi tidak terlalu ekstrim melumpuhkan perekonomian di NTT.

Apabila ditinjau dari capaian nilai Indeks Inklusif II tahun 2024, wilayah Provinsi NTT dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu inklusif tinggi, inklusif menengah, dan inklusif rendah.

Tabel 5. Kategori Indeks Inklusif II Kabupaten/Kota di Provinsi NTT 2024

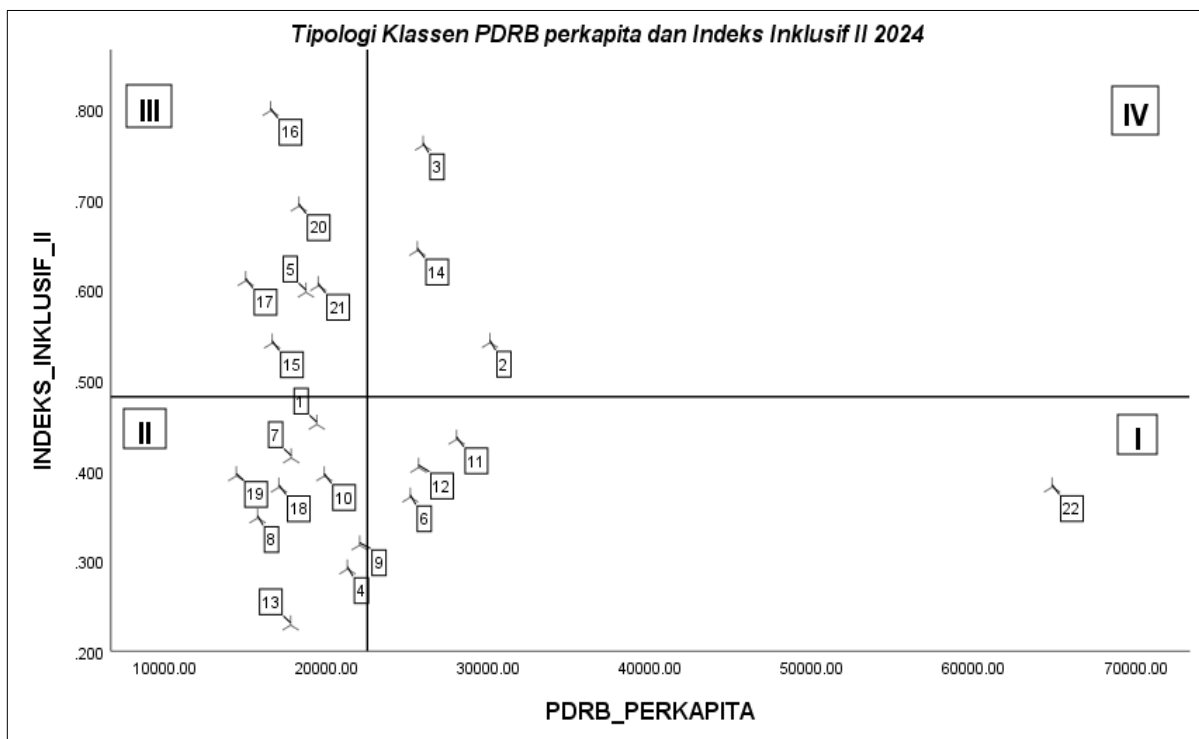
Indeks Inklusif II	Tingkat Inklusif	Kabupaten/Kota
0,76	Rendah	Kupang
0,64	Rendah	Rote Ndao
0,80	Rendah	Sumba Tengah
0,61	Rendah	Sumba Barat Daya
0,69	Rendah	Sabu Raijua
0,60	Rendah	Malaka
0,45	Menengah	Sumba Barat
0,54	Menengah	Sumba Timur
0,60	Menengah	Timor Tengah Utara
0,41	Menengah	Alor
0,43	Menengah	Ende
0,40	Menengah	Ngada
0,54	Menengah	Manggarai Barat
0,29	Tinggi	Timor Tengah Selatan
0,37	Tinggi	Belu
0,35	Tinggi	Lembata
0,32	Tinggi	Flores Timur
0,39	Tinggi	Sikka
0,23	Tinggi	Manggarai
0,38	Tinggi	Nagekeo
0,39	Tinggi	Manggarai Timur
0,38	Tinggi	Kota Kupang

Sumber : BPS Provinsi NTT, (diolah)

Berdasarkan uraian Tabel 5. menunjukkan masih adanya kesenjangan spasial nyata dalam hal inklusivitas pertumbuhan ekonomi antardaerah di Provinsi NTT. Hasil ini menyampaikan pesan penting bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis inklusif. Diperlukan upaya serius agar pertumbuhan menyentuh dan dinikmati seluruh masyarakat. Daerah-daerah yang mencatat skor inklusif yang membaik kemungkinan telah mulai mengurangi angka kemiskinan lewat intervensi yang tepat sasaran, mengupayakan distribusi pendapatan yang lebih seimbang atau mampu menciptakan lebih banyak peluang kerja. Sebaliknya, daerah dengan skor memburuk seperti Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua dan Malaka butuh perhatian lebih apakah intervensi kebijakan sudah menjangkau yang benar-benar miskin, apakah ada ketimpangan pada akses seperti pendidikan atau layanan dasar serta lapangan kerja yang tersedia dan layak. Indeks Inklusif II memberikan gambaran yang utuh tentang kualitas pertumbuhan di Provinsi NTT, diharapkan setiap daerah perlu memahami bukan hanya pertumbuhan pendapatan yang dikejar, tetapi juga keberpihakan, pemerataan dan keterlibatan masyarakat nyata dalam pembangunan.

### Gambaran PDRB per Kapita dan Indeks Inklusif II

PDRB per kapita menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Perubahan yang terjadi pada indikator ini menunjukkan perubahan yang terjadi juga pada suatu perekonomian. Perubahan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja ekonomi untuk menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi makro selanjutnya.



Gambar 1. Tipologi Klassen PDRB per kapita dan Indeks Inklusif II Tahun 2024

Gambar 1 menyajikan hasil analisis menggunakan pendekatan Tipologi Klassen yang dimodifikasi untuk memetakan posisi kabupaten/kota di Provinsi NTT berdasarkan kombinasi antara tingkat kesejahteraan yang diwakili oleh PDRB per kapita, dan kualitas pembangunan inklusif yang tercermin dari Indeks Inklusif II. Pendekatan ini merujuk pada kerangka yang dikembangkan oleh Klassen (1960), yang pada dasarnya mengelompokkan wilayah amatan ke dalam empat kuadran berbeda berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Namun, dalam konteks kajian ini akan digunakan Indeks Inklusif II untuk menggantikan indikator pertumbuhan ekonomi sebagai dimensi keadilan pembangunan. Selain itu juga, ada penyesuaian terhadap penempatan kuadran I sampai kuadran IV dikarenakan perbedaan analisis Indeks Inklusif II dan PDRB per kapita, dimana semakin mendekati 0 nilai indeks makin inklusif sementara makin tinggi nilai PDRB per kapita makin sejahtera.

Klasifikasi wilayah ke dalam empat kuadran bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara kemajuan ekonomi dan kualitas pembangunan yang berkeadilan, sehingga dapat diidentifikasi daerah-daerah yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu memastikan pemerataan hasil pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat. Berikut klasifikasi kabupaten/kota di Provinsi NTT berdasarkan Tipologi Klassen.

#### **Kuadran I : Makmur dan Inklusif**

Wilayah di kuadran I mencakup kabupaten/kota dengan karakteristik PDRB per kapita secara rata-rata yang tinggi dan tingkat inklusivitas yang sangat baik mendekati 0 yang menunjukkan kesenjangan yang sangat kecil. Wilayah-wilayah ini mencerminkan daerah dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang relatif tinggi dan pada saat yang sama menunjukkan pencapaian yang baik dalam pemerataan hasil pembangunan. Kondisi ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan yang terjadi di wilayah-wilayah ini tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif menyentuh lapisan masyarakat. Ini adalah target atau kondisi ideal yang ingin dicapai.

Pada tahun 2024, wilayah pada kuadran pertama ini seperti Kota Kupang, Belu, Ende dan Ngada dapat dijadikan contoh keberhasilan dalam memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Wilayah-wilayah ini mencerminkan pembangunan yang ideal, dimana pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi berhasil disertai dengan distribusi manfaat yang adil. Ini menunjukkan keberhasilan dalam kombinasi kebijakan ekonomi dan sosial yang baik.

#### **Kuadran II : Potensi Terbatas tetapi Inklusif**

Wilayah di kuadran II ini memiliki karakteristik PDRB per kapita yang secara rata-rata rendah atau kurang bagus, tetapi memiliki tingkat inklusivitas yang sangat baik secara merata. Artinya, meskipun tingkat kesejahteraannya belum tinggi tetapi pembangunan

yang berlangsung di wilayah-wilayah ini sudah relatif adil dan menjangkau kelompok masyarakat secara lebih luas. Daerah-daerah seperti Sumba Barat, Alor, Lembata, Manggarai Timur, Sikka, Flores Timur, Manggarai, Nagekeo dan Timor Tengah Selatan, wilayah di kuadran ini menunjukkan bahwa meskipun dengan sumber daya ekonomi yang terbatas, kebijakan pembangunan yang pro rakyat tetap dapat mendorong tercapainya pemerataan hasil pembangunan. Dengan dasar fondasi inklusivitas yang relatif kuat, wilayah-wilayah ini memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih cepat jika diiringi dengan peningkatan produktivitas dan investasi pada sektor-sektor strategis.

### **Kuadran III : Kurang Makmur dan Kurang Inklusif**

Wilayah di kuadran III memiliki karakteristik PDRB per kapita yang secara rata-rata rendah atau kurang bagus dan tingkat inklusivitas yang kurang baik. Kuadran ini merepresentasikan wilayah dengan tantangan pembangunan yang kompleks, yaitu tingkat kesejahteraan ekonomi yang masih sangat rendah serta kualitas pembangunan yang belum merata. Wilayah ini menghadapi tantangan ganda berupa PDRB yang rendah dan juga tingkat inklusivitasnya yang rendah mencerminkan kondisi ketertinggalan baik dari sisi ekonomi dan pembangunan. Kabupaten seperti Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Malaka, Timor Tengah Utara dan Manggarai Barat tergolong dalam kategori ini.

Daerah-daerah tersebut membutuhkan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih berfokus baik dalam bentuk penguatan infrastruktur dasar, peningkatan akses layanan publik, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tanpa strategi khusus, wilayah di kuadran ini beresiko tertinggal dalam proses pembangunan regional.

### **Kuadran IV : Makmur dan Kurang Inklusif**

Wilayah dalam kuadran IV ini memiliki karakteristik PDRB per kapita yang secara rata-rata tinggi tetapi indeks inklusifnya di atas rata-rata provinsi, yang artinya pembangunan yang terjadi masih cenderung eksklusif dan belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

Ketimpangan pendapatan, tingginya angka kemiskinan atau rendahnya partisipasi angkatan kerja menjadi sinyal bahwa pembangunan atau kemakmuran ekonomi yang terjadi belum dinikmati secara merata. Beberapa daerah seperti Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sumba Timur termasuk dalam kelompok ini.

Meskipun menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup kuat, tantangan utama di daerah-daerah ini adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya terpusat di kelompok tertentu saja. Peningkatan inklusivitas dapat dilakukan melalui kebijakan distribusi pendapatan, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Strategi pembangunan ekonomi yang perlu dipastikan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pertumbuhan tinggi tetapi harus berbasis masyarakat.

#### 4. Simpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan ekonomi di Provinsi NTT berlangsung secara inklusif di tingkat kabupaten/kota. Melalui pendekatan Indeks Inklusif II dapat disimpulkan bahwa pencapaian pembangunan yang inklusif di NTT masih menunjukkan variasi yang cukup tinggi antarwilayah.

Beberapa daerah seperti Kota Kupang, Belu, dan Ngada menunjukkan capaian pembangunan yang tergolong inklusif, sementara kabupaten lainnya, terutama Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, dan Malaka masih menghadapi tantangan serius baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan hasil pembangunan.

#### Kesimpulan

**1. Kemiskinan menurun, namun belum merata antarwilayah.** Mayoritas kabupaten/kota mengalami penurunan persentase penduduk miskin pada periode 2018-2024, namun masih terdapat ketimpangan spasial seperti beberapa daerah Sumba Tengah, Sabu Raijua dan Sumba Barat Daya masih mencatatkan kemiskinan di atas 27 persen, menunjukkan distribusi manfaat pertumbuhan yang belum adil.

**2. Ketimpangan pendapatan mengalami perbaikan sangat terbatas.** Rata-rata Rasio cenderung menurun, namun tidak signifikan di sebagian besar wilayah, bahkan beberapa wilayah seperti Kabupaten Manggarai Timur dan Malaka mengalami peningkatan ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ekonomi tumbuh, distribusi pendapatan masih bersifat eksklusif di sejumlah daerah. Artinya, pertumbuhan hanya dinikmati sebagian masyarakat.

**3. Partisipasi ekonomi meningkat, tetapi belum menjamin kualitas pekerjaan.** EPR meningkat di banyak kabupaten, namun tidak selalu sejalan dengan penurunan kemiskinan. Hal ini memperkuat argumen Todaro dan Smith (2015), banyak wilayah miskin memiliki EPR yang tinggi karena keterpaksaan masyarakat untuk bekerja pada sektor informal berproduktivitas rendah demi memenuhi kebutuhan hidup, bukan karena tersedianya lapangan kerja yang layak.

**4. Skor Indeks Inklusif II yang bervariasi tajam antarwilayah.** Ada kemajuan nyata dalam pembangunan inklusif di beberapa daerah, seperti Kabupaten Lembata, Sumba Barat dan Belu, namun sejumlah daerah justru mengalami kemunduran seperti Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara, Kupang dan Sabu Raijua. Artinya, tidak semua pertumbuhan bersifat inklusif dan dinikmati masyarakat.

**5. Tipologi Klassen menunjukkan ketimpangan spasial pembangunan antarwilayah.** Melalui pendekatan Tipologi Klassen diketahui bahwa :

- Kuadran I (Makmur dan Inklusif) yaitu :  
Kota Kupang, Belu, Ngada dan Ende
- Kuadran II (Potensi Terbatas tetapi Inklusif) yaitu :

Kabupaten Sumba Barat, Alor, Lembata, Manggarai Timur, Sikka, Manggarai, Nagekeo, Flores Timur dan Timor Tengah Selatan.

- Kuadran III (Kurang Makmur dan Kurang Inklusif) yaitu : Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Malaka, Manggarai Barat dan Timor Tengah Utara.
- Kuadran IV (Makmur dan Kurang Inklusif) yaitu : Kabupaten Sumba Timur, Kupang dan Rote Ndao.

#### **Saran:**

**1. Pentingnya perbedaan pendekatan pembangunan.** Pemerintah daerah perlu merancang strategi disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Seperti daerah dalam kuadran III misalnya, diperlukan intervensi mencakup pembangunan infrastruktur dasar, penguatan kapasitas masyarakat, serta peningkatan akses layanan dasar.

**2. Perlunya penguatan kebijakan yang mendukung inklusivitas.** Pemerintah daerah perlu untuk mengintegrasikan prinsip inklusivitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas tenaga kerja harus diarahkan agar benar-benar menysasar kelompok masyarakat rentan.

**3. Monitoring dan evaluasi berbasis Indeks Inklusif.** Indeks Inklusif II dapat digunakan sebagai alternatif alat bantu lain dalam mengevaluasi kinerja pembangunan daerah secara berkelanjutan. Tidak hanya PDRB atau pertumbuhan ekonomi yang menjadi ukuran keberhasilan, tetapi juga seberapa jauh manfaat pembangunan dirasakan masyarakat secara merata.

#### ***Ethics Approval***

Seluruh prosedur dalam penelitian ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip serta etika publisitas. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi terbuka dan tidak mengandung identitas pribadi, sehingga tidak perlu persetujuan etik.

#### ***Conflict of Interest***

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan terkait penelitian ini.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Ali, I., & Son, H.H. (2007). *Measuring inclusive growth. Asian Development Review*, 24(1), 11–31. <https://doi.org/10.1234/jpi.v10i2.5678>

- [2] Ali, I., (2007). *Pro poor to Inclusive Growth: Asian Prescriptions*. ERD Policy Brief No. 48, Economics and Research Department, Asian Development Bank (ADB), Manila
- [3] Anand, R., Mishra, S., & Peiris, S.J. (2013). *Inclusive Growth: Measurement and Determinants* (IMF Working Paper No. 2013/135). International Monetary Fund
- [4] Badan Pusat Statistik. (2023). Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA): Metadata Statistik Resmi BPS.
- [5] Badan Pusat Statistik. (2024). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- [6] Badan Pusat Statistik. (2024a). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2018-2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- [7] Badan Pusat Statistik. (2024b). Persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota 2018-2024. BPS Provinsi NTT.
- [8] Badan Pusat Statistik. (2024c). Angkatan Kerja (Laki-laki+Perempuan) menurut Kabupaten/Kota (Perkotaan+Perdesaan)(Jiwa), 2018-2024. BPS Provinsi NTT.
- [9] Badan Pusat Statistik. (2024d). Bukan Angkatan Kerja (Laki-laki+Perempuan) menurut Kabupaten/Kota (Perkotaan+Perdesaan)(Jiwa), 2018-2024. BPS Provinsi NTT.
- [10] International Labour Organization. (n.d.) Employment-to-population ratio [ILOSTAT definitions]. Retrieved May 2025 from <https://ilostat.ilo.org/data/snapshots/employment-to-population-ratio/>
- [11] Klassen, L.H. (1960). *Economic Development and Growth*. London: Macmillan
- [12] McKinley, T. (2010) *Inclusive growth criteria and indicators: An inclusive growth index for diagnosis of country progress* (ADB Sustainable Development Working Paper No. 14). Asian Development Bank
- [13] Ranieri, R., & Ramos, R. A. (2013). *Inclusive Growth: Building Up a Concept*. International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG)
- [14] Sitorus, A. V. Y., & Arsani, A. M. (2018). *A comparative study of inter-provincial inclusive economic growth in Indonesia 2010–2015 with approach methods of ADB, WEF, and UNDP*. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 2(1), 64–77. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.32>
- [15] Todaro, M.P., & Smith, S.C.(2015). *Economic Development (12<sup>th</sup> ed.)*. Boston: Pearson..

- [16] World Bank. (2009). What Is Inclusive Growth? PRMED Knowledge Briefs. 10 February. Washington, DC : World Bank
- [17] World Bank. (2021). *World Developmentc Indicators*. Washington, DC: World Bank Group
- [18] World Bank. (2023). *Gini Index (World Bank estimate)* Washington, DC: World Bank Group